

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)**



**BPPKAD
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kekuatan dan bimbingan-Nya semata Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024 ini dilakukan guna mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun ketiga. Disamping itu juga dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Materi Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) SKPD ini mencakup antara lain: Latar Belakang, Landasan hukum, Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Tupoksi, Tujuan, Sasaran, Program dan Indikasi Kegiatan. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi perbaikan di masa mendatang.

Demikian harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun Anggaran 2024.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ANANG ARMUNANTO, S.Sos.M.Si
NIP. 19730122 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTA ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 12

2.3 Isu-Isu Strategis Tugas dan Fungsi PD 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 45

3.3. Program dan Kegiatan 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH 47

BAB V PENUTUP 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan disingkat dengan Renstra-PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun RenjaPerangkat Daerah yang selanjutnya akan disingkat dengan Renja-PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Renja-PD sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah selanjutnya akan disingkat dengan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di dalam Renja-PD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra -PD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan adanya Renja-PD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program PD lainnya.

Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun Ketiga dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Renja-PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2021 tentang Renstra Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, BPPKAD Kabupaten Grobogan telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2022, BPPKAD Kabupaten Grobogan secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp. 484.786.643.551,- dengan realisasi sebesar Rp.476.846.545.862,- atau total 98,36% dari total alokasi yang ada. Target kinerja hasil/keluaran Program yang direncanakan pada Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan terdapat 4 Program yang telah dilaksanakan selama tahun ke-3 terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Realisasi pada 4 Program BPPKAD Kabupaten Grobogan tersebut yang sebagian besar telah mencapai target 100 persen, akan tetapi pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki perbedaan dalam realisasi dikarenakan factor eksternal yang dipengaruhi oleh geopolitika pendapatan kabupaten dampak covid-19. Indikator tersebut ialah Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan mengalami naik-turun diantaranya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, pada Tahun 2021 memiliki realisasi sebesar 21,35 % dan Tahun 2022 mengalami penurunan (0,026) % Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan tidak tercapainya Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masih belum optimal. Untuk penjabaran yang lebih lanjut terdapat tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 BPPKAD Kab.Grobogan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
BPPKAD KAB. GROBOGAN**

KODE				Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02			Urusan Keuangan									
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah									
5	02	01	2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	24 Dokumen	100
5	02	01	2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	15 Laporan	100
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	02	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan keseharan ASN	42 Bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	42 Bulan	100

5	02	01	2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	3600 Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	100	1200 Dokumen	3600 Dokumen	100
5	02	01	2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	93 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	93 Laporan	100
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0							100
5	02	01	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	320 Paket	0	160 Paket	160 Paket	100	160 Paket	320 Paket	100
5	02	01	2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	165 Orang	55 Orang	55 Orang	55 Orang	100	55 Orang	165 Orang	100
5	02	01	2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	270 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	70 orang	270 Orang	100
5	02	01	2.05.11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	240 Orang	85 Orang	85 Orang	85 Orang	100	70 orang	240 Orang	100
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	02	01	2.06.01	Penyediaan komponen Instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4580 Paket	1560 Paket	1560 Paket	1560 Paket	100	1560 Paket	4580 Paket	100
5	02	01	2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	69 Paket	6 Paket	43 Paket	43 Paket	100	20 Paket	69 Paket	100
5	02	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	95608 Paket	31536 Paket	31536 Paket	31536 Paket	100	32536 Paket	95608 Paket	100
5	02	01	2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	419125 paket	138125 Paket	140000 Paket	140000 Paket	100	141000 Paket	419125 paket	100
5	02	01	2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumentasi bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	684 dokumen	228 dokumen	228 dokumen	228 dokumen	100	228 dokumen	684 dokumen	100
5	02	01	2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	42033 Paket	14011 Paket	14011 Paket	14011 Paket	100	14011 Paket	42033 Paket	100
5	02	01	2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13150 Laporan	4375 Laporan	4400 Laporan	4400 Laporan	100	4375 Laporan	13150 Laporan	100
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									100
5	02	01	2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	100
5	02	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	36 Laporan	100

5	02	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	36 Laporan	100
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									100
5	02	01	2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	171 Unit	57 Unit	57 Unit	57 Unit	100	57 Unit	171 Unit	100
5	02	01	2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	100
5	02	01	2.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	13 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	1 Unit	13 Unit	100
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5	02	02	2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	147 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	100	49 Dokumen	147 Dokumen	100
5	02	02	2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
5	02	02	2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
5	02	02	2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
5	02	02	2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	147 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	100	49 Dokumen	147 Dokumen	100
5	02	02	2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	360 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100	120 Orang	360 Orang	100

5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
5	02	02	2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	198 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	100	100 dokumen	198 Dokumen	100
5	02	02	2.02.05	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	780 Orang	260 orang	260 orang	260 orang	100	260 Orang	780 Orang	100
5	02	02	2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	21000 Dokumen	9000 Dokumen	9000 Dokumen	9000 Dokumen	100	3000 Dokumen	21000 Dokumen	100
5	02	02	2.02.10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas sertapenatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	100
5	02	02	2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	548 orang	49 OPD	49 OPD	49 OPD	100	450 orang	548 orang	100
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									100
5	02	02	2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	7 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	3 Laporan	7 laporan	100
5	02	02	2.03.04	Konsolidasi laporan keuangan SKPD , BLUD dan laporan keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	6 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 laporan	100
5	02	02	2.03.05	Konsolidasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	10 dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	10 dokumen	100
5	02	02	2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasioanl	4	0	2	2	100	2	4 dokumen	100

				Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen		
5	02	02	2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	390 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100	150 Orang	390 Orang	100
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									100
5	02	02	2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	100
5	02	02	2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	819 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	100	273 Laporan	819 Laporan	100
5	02	02	2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	100
5	02	02	2.04.10	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ Kota	819 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	100	273 Laporan	819 Laporan	100
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	03		Pengelolaan Barang Milik Daerah									100
5	02	03	2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	100
5	02	03	2.01.03	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	30 Dokumen	100
5	02	03	2.01.05	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	98 Laporan	0	49 Laporan	49 Laporan	100	49 Laporan	98 Laporan	100
5	02	03	2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	49 Laporan	0	0	0	100	49 Laporan	49 Laporan	100
5	02	03	2.01.09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	24 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	100
5	02	03	2.01.10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100	40 Dokumen	120 Dokumen	100
5	02	03	2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	147 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	100	49 Laporan	147 Laporan	100
5	02	03	2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun	147 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	100	49 Laporan	147 Laporan	100
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	6	5,85	2	37,73	2	2	43,58	726,33

				PENDAPATAN DAERAH									
5	02	04	2.01	KegiatanPengelolaanPendapatan Daerah									
5	02	04	2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	3 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
5	02	04	2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1452 Laporan	450 WP	1000 WP	1000 WP	100	2 laporan	1452 Laporan	100
5	02	04	2.01.04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	795 Unit	255 Unit	255 Unit	255 Unit	100	285 Unit	795 Unit	100
5	02	04	2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah, subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	212500 Laporan	0	62500 OP	62500 OP	100	150000 Laporan	212500 Laporan	100
5	02	04	2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	4 Laporan	100
5	02	04	2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	1660000 Dokumen	0	830000 Dokumen	830000 Dokumen	100	830000 Dokumen	1660000 Dokumen	100
5	02	04	2.01.09	Pelayanan dan konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	34108 layanan	0	16983 Layanan	16983 Layanan	100	17125 Layanan	34108 layanan	100
5	02	04	2.01.10	Penelitian dan Verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	250000 Dokumen	0	125000 Dokumen	125000 Dokumen	100	125000 Dokumen	250000 Dokumen	100
5	02	04	2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2460000 Dokumen	815000 Dokumen	820000 Dokumen	820000 Dokumen	100	825000 Dokumen	2460000 Dokumen	100
5	02	04	2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	486 Dokumen	111 Dokumen	161 Dokumen	161 Dokumen	100	214 Dokumen	486 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 83 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, Uraian Tugas jabatan dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok “ ***Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah***”. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan Daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan Daerah;
- e. Pengelolaan kesekretariatan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. Merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan Daerah;
4. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang keuangan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;

8. Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
10. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah yang telah ditetapkan;
12. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan menetapkan Surat Penyediaan Dana;
13. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pelimpahan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
15. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Melaksanakan dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan pengeluaran kas Daerah;
18. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
19. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
20. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
21. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah;
22. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
23. Melakukantindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
24. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
25. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertanggungjawaban keuangan;

26. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
27. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
28. Menandatangani Surat Perintah Membayar dan mengawasi pelaksanaan anggaran Badan;
29. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Badan;
30. Melaksanakan pengelolaan Asset Daerah atau Barang Milik Daerah/ kekayaan Daerah;
31. Menyusun Standar satuan harga di Daerah;
32. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Bupati;
33. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
34. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
35. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
36. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
37. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan Pajak I.

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya.

Bidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Administrasi Anggaran.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Aset Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang keahlian. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/ atau tim kerja. Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan adalah Meningkatnya PAD dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator Opini Laporan Keuangan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Persentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 2 %.

Untuk mencapai target tersebut disajikan formulasi capaian sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah

$$\text{Persentase Peningkatan Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah Tahun } n - \text{Pajak Daerah Tahun } n - 1}{\text{Pajak Daerah Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Pajak Daerah Tahun n = Pajak Daerah tahun pelaporan
Pajak Daerah Tahun n -1 = Pajak Daerah tahun pelaporan - tahun sebelumnya

2. Indikator Opini Laporan Keuangan BPK

Hasil Audit BPK – RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Tabel 2.2
Capaian Pajak Daerah Tahun 2019 - 2022

NO	URAIAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	96.135.385.765	96.135.385.765	101.757.417.253	140.153.778.33

Dari tabel di atas dijelaskan capaian Pajak Daerah dalam jangka waktu empat tahun terakhir, dimana setiap tahunnya pendapatan dari sektor Pajak Daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 37,73% dibandingkan tahun 2021.

Selanjutnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan dijabarkan di tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BPPKAD KABUPATEN GROBOGAN

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ketepatan waktu penetapan APBD, Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah			2	2	3	3	37,73	2	3	3	

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu pelaksanaan. Adapun isu strategis yang disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kondisi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 2. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan;
- 3. Belum optimalnya pengelolaan asset di setiap Perangkat Daerah;
- 4. Masih kurangnya kapasitas pengelola keuangan di masing-masing Perangkat Daerah.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan untuk merumuskan permasalahan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan menganalisis kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan mendasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dirinci sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Administrasi Anggaran

- 1) Belum optimalnya sinkronisasi antara KUA/ KUPAPPAS dengan RKPD, terkendala system yang belum terintegrasi;
- 2) Belum optimalnya ketidaksesuaian antara judul kegiatan, indikator kinerja, target dan belanja dalam RKA sehingga perlu dilakukan pengulangan pelaksanaan verifikasi RKA;
- 3) Penetapan prioritas anggaran belanja perangkat daerah yang belum tepat sehingga sulit mencapai target pembangunan daerah;
- 4) Kurangnya waktu pelaksanaan verifikasi RKA dalam penyusunan APBD;
- 5) Keterlambatan regulasi yang baru sehingga memerlukan penyesuaian dengan regulasi yang baru dalam penyusunan APBD.

b. Permasalahan terkait Perbendaharaan

- 1) Adanya keterlambatan rekomendasi propinsi dan belum diketahuinya rincian objek/ nilai pajak yang berdampak pada ketidak sesuaian penerimaan dana transfer;
- 2) Belum diketahuinya rincian objek/ nilai pajak sehingga terjadi ketidak sesuaian laporan antara penerimaan dan belanja;
- 3) Kurangnya SDM yang berdampak pada penerbitan SP2D yang melebihi deadline;
- 4) SDM pengelola keuangdari OPD yang bervariasi dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda;
- 5) Admin OPD menangani semua aplikasi sehingga kecenderungan keterlambatan dalam pelaporan;
- 6) Banyaknya jenis kebijakan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan dengan dinamika perubahan yang cepat yang harus segera ditindak lanjuti oleh daerah.

c. Permasalahan terkait Akuntansi

- 1) Kurangnya ketepatan waktu dan kualitas laporan dari entitas akuntansi dan fungsi penatausahaan keuangan maupun aset;
- 2) Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis di daerah;
- 3) Pemahaman entitas yang masih kurang mengenai pentingnya audit keuangan oleh akuntan publik, sampai dengan tahun 2020 baru 32 BLUD yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

d. Permasalahan terkait Pendapatan Daerah

- 1) Terbatasnya ASN dan SDM yang belum memenuhi kompetensi bidang Perpajakan, baru ada pemeriksa pajak, belum ada Juru Sita;
- 2) Perlunya dilakukan perubahan Perda terkait Pendapatan daerah karena sudah tidak relevan;
- 3) Minimnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak;
- 4) Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami dan menggunakan system Online dalam pelayanan Pajak, dan Wajib Pajak yang enggan menggunakan pelayanan pajak online karena belum melek digital, sehingga belum bias menginput SPTPD secara online dan kadang terkendala dengan jaringan;
- 5) Kurangnya Panggung Reklame untuk menyebarluaskan informasi Pajak dan Retribusi;
- 6) Belum optimalnya penertiban Pajak secara terpadu dengan pihak terkait, dan belum terintegrasinya Sistem Pajak Daerah dengan Pengawasan dan Penertiban;
- 7) Masih banyaknya jumlah obyek pajak/ Desa yang belum masuk dalam SISMIOP, dan perlunya pembenahan sistem untuk memudahkan pelayanan. Sampai dengan tahun 2020 obyek pajak/ Desa telah SISMIOP baru mencapai 60%;
- 8) Masih banyak WP yang melakukan negosiasi hal omzet;
- 9) Masih terdapat celah yang bisa disalah gunakan oknum dalam pemungutan pajak daerah;
- 10) Petugas verifikator yang terbatas (3 orang) dan dalam memverifikasi pajak banyak yang tidak sesuai kondisidi lapangan;
- 11) Terkendalanya petugas di lapangan dalam pendataan, dan pemungut pajak yang tidak bertemu denganWajib Pajak;
- 12) Belum terintegrasinya antara SIPADA dengan sistem penatausahaan keuangan sehingga Laporan Pendapatan harus dilakukan Rekonsiliasi dalam setiap bulannya;
- 13) Laporan sering terlambat karena bukti transfer tidak teridentifikasi karena belum menggunakan Billing.

e. Permasalahan terkait Aset Daerah

- 1) Belum tersusunnya standar kebutuhan Barang Milik Daerah;
- 2) Belum tersusunnya RKBMD oleh sebagian OPD;
- 3) Belum semua OPD melengkapi informasi BMD berdampak keterlambatan penyusunan LKPD;
- 4) Belum terpenuhi standar kompetensi pengurus barang OPD;
- 5) Masih belum tersedianya tenaga penilai yang mempunyai sertifikat penilai dari kementerian keuangan;
- 6) Penempatan barang OPD yang tidak pasti/ berubah karena mutasi;
- 7) Penyusunan laporan BMD dari OPD yang tidak tepat waktu sesuai dengan deadline yang ditetapkan.

f. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan, terutama teknologi informasi dan sarana penyimpanan arsip;
- 2) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Kurangnya kompetensi aparatur Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPPKAD Kabupaten Grobogan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BPPKAD Kabupaten Grobogan, terkait program prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berikut ini disajikan hasil review terhadap Renja BPPKAD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, yang disajikan pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 BPPKAD Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
BPPKAD KABUPATEN GROBOGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KEUANGAN				489.068.112.422					489.068.112.422	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	26.038.201.422	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	26.038.201.422	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				188.570.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				188.570.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	113.360.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	113.360.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	75.210.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	75.210.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.093.331.422	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.093.331.422	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ bulan	21.008.831.422	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ bulan	21.008.831.422	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31 Laporan	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31 Laporan	34.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				561.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				561.300.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	170.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	170.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	50.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	30.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	30.500.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	310.800.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	310.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.400.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.400.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1560 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1560 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42536 Paket	500.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42536 Paket	500.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	141000 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	141000 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	228 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	228 Dokumen	10.000.000	

	Penyediaan Bahan/ Material	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	14011 Paket	500.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	14011 Paket	500.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4375 Laporan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4375 Laporan	1.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.245.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.245.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	270.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	270.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	454.246.863.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	100%	454.246.863.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.770.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.770000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	49 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	49 Dokumen	150.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	525.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	525.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	510.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	510.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	360.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	360.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	49 Dokumen	50.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	49 Dokumen	50.000.000	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	120 Orang	175.000.000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	120 Orang	175.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.191.850.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.191.850.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan	49 Dokumen	123.850.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan	49 Dokumen	123.850.000	

		Semua Kel/Desa	Kas Daerah					Kas Daerah			
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dokumen	293.000.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dokumen	293.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8 Dokumen	215.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8 Dokumen	215.000.000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	80.000.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	490 Orang	480.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	490 Orang	480.000.000	

			Kuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				966.150.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				966.150.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	62.610.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	62.610.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	97.950.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	97.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	553.690.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	553.690.000	

	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	151.900.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	151.900.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				450.318.863.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				450.318.863.000	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	4.288.334.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	4.288.334.000	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	273 Laporan	415.340.315.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	273 Laporan	415.340.315.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	12 Laporan	16.349.624.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	12 Laporan	16.349.624.000	

		Semua Kel/Desa	Mendesak					Mendesak			
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	273 Laporan	14.340.590.000	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	273 Laporan	14.340.590.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	100%	1.163.048.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	100%	1.163.048.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.163.048.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.163.048.000	
	Penyusunan Standar Harga	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa - Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Harga	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	80.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	49 Laporan	60.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	49 Laporan	60.000.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	49 Laporan	150.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	49 Laporan	150.000.000	

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	58.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	58.000.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	49 Dokumen	200.000.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	49 Dokumen	200.000.000,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	49 Laporan	365.048.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	49 Laporan	365.048.000,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	49 Laporan	100.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	49 Laporan	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3%	7.620.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3%	7.620.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.620.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.620.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	2 Dokumen	200.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	2 Dokumen	200.000.000,00	

			Daerah					Daerah			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	700.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	700.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	288 Unit	1.250.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	288 Unit	1.250.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	304000 Laporan	3.500.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	304000 Laporan	3.500.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	150.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	150.000.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	835000 Dokumen	225.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	835000 Dokumen	225.000.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	17125 Layanan	285.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	17125 Layanan	285.000.000	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	125000 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	125000 Dokumen	150.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan,	Jumlah Dokumen	825000	300.000.000	PenagihanPajak	- Kab. Grobogan,	Jumlah Dokumen	825000	300.000.000	

		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	214 Dokumen	860.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	214 Dokumen	860.000.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terhadap Rancangan Awal RKPD ialahhasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berikut ini disajikan hasil kajian terhadap Renja BPPKAD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, yang disajikan pada tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 BPPKAD Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
BPPKAD KAB. GROBOGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh Prioritas Nasional diatas, terdapat beberapa sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan sasaran kinerja BPPKAD Kabupaten Grobogan yaitu Sasaran ke 4 untuk PN 7 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dari Bupati Grobogan yaitu “*Terwujudnya Grobogan yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya*” serta Misi dari Bupati yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yaitu “*Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik*”.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026 adalah

“Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”.

Sasaran sesuai dengan Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kualitas Penetapan APBD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu;
3. Meningkatnya kualitas kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan perundang-undangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Pada Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ketiga dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2021- 2026. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
- Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
- Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah
- Koordinasi Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Analisa dan Pengemabangan Pajak daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah

Secara rinci rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan;
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Dijelaskan pada tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan MajuTahun 2025 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BPPKAD Kabupaten GROBOGAN

Kode	Urusan/ Bidang dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KEUANGAN				489.068.112.422				513.521.518.043
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik		100%	26.038.201.422	APBD		100%	27.340.111.493
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Grobogan		188.570.000	APBD			197.998.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	8 Dokumen	113.360.000	APBD		8 Dokumen	119.028.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	5 Laporan	75.210.000	APBD		5 Laporan	78.970.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.093.331.422	APBD			22.147.997.993
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan keseharan ASN	Kab. Grobogan	62 Orang/ bulan	21.008.831.422	APBD		62 Orang/ bulan	22.059.272.993
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Kab. Grobogan	1200 Dokumen	50.000.000	APBD		1200 Dokumen	52.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Grobogan	31 Laporan	34.500.000	APBD		31 Laporan	36.225.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				561.300.000	APBD			589.365.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Kab. Grobogan	160 Paket	170.000.000	APBD		160 Paket	178.500.000

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Grobogan	55 Orang	50.000.000	APBD		55 Orang	52.500.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Grobogan	70 Orang	30.500.000	APBD		70 Orang	32.025.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Grobogan	70 Orang	310.800.000	APBD		70 Orang	326.340.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.400.000.000	APBD			2.520.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Grobogan	1560 Paket	40.000.000	APBD		1560 Paket	42.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Grobogan	20 Paket	250.000.000	APBD		20 Paket	262.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Grobogan	42536 Paket	500.000.000	APBD		42536 Paket	525.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Grobogan	141000 Paket	100.000.000	APBD		141000 Paket	105.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumentasi bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Grobogan	228 Dokumen	10.000.000	APBD		228 Dokumen	10.500.000
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	Kab. Grobogan	14011 Paket	500.000.000	APBD		14011 Paket	525.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Grobogan	4375 Laporan	1.000.000.000	APBD		4375 Laporan	1.050.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.245.000.000	APBD			1.307.250.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Grobogan	12 Laporan	95.000.000	APBD		12 Laporan	99.750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Grobogan	12 Laporan	250.000.000	APBD		12 Laporan	262.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Grobogan	12 Laporan	900.000.000	APBD		12 Laporan	945.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				550.000.000	APBD			577.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Grobogan	57 Unit	270.000.000	APBD		57 Unit	283.500.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Grobogan	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	105.000.000

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Grobogan	1 Unit	180.000.000	APBD		1 Unit	189.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah		100%	454,246,863,000	APBD		100%	476.959.206.150
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kab. Grobogan		1.770.000.000	APBD			1.858.500.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Kab. Grobogan	49 Dokumen	150.000.000	APBD		49 Dokumen	157.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Grobogan	2 Dokumen	525.000.000	APBD		2 Dokumen	551.250.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Kab. Grobogan	2 Dokumen	510.000.000	APBD		2 Dokumen	535.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Grobogan	2 Dokumen	360.000.000	APBD		2 Dokumen	378.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Kab. Grobogan	49 Dokumen	50.000.000	APBD		49 Dokumen	52.500.000
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Grobogan	120 Orang	175.000.000	APBD		120 Orang	183.750.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kab. Grobogan		1.191.850.000	APBD			1.251.442.500
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Kab. Grobogan	49 Dokumen	123.850.000	APBD		49 Dokumen	130.042.500
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Grobogan	11 Dokumen	293.000.000	APBD		11 Dokumen	307.650.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Grobogan	8 Dokumen	215.000.000	APBD		8 Dokumen	225.750.000
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	Jumlah Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta	Kab. Grobogan	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	84.000.000

	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan							
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Grobogan	490 Orang	480.000.000	APBD		490 Orang	504.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				966.150.000	APBD			1.014.457.500
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Kab. Grobogan	3 Laporan	62.610.000	APBD		3 Laporan	65.740.500
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Kab. Grobogan	2 Laporan	97.950.000	APBD		2 Laporan	102.847.500
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kab. Grobogan	4 Dokumen	553.690.000	APBD		4 Dokumen	581.374.500
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Grobogan	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	105.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Grobogan	150 Orang	151.900.000	APBD		150 Orang	159.495.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				450,318,863,000	APBD			472.834.806.150
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah	Kab. Grobogan	12 Laporan	4.288.334.000	APBD		12 Laporan	4.502.750.700
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Grobogan	273 Laporan	415.340.315.000	APBD		273 Laporan	436.107.330.750
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Grobogan	12 Laporan	16.349.624.000	APBD		12 Laporan	17.167.105.200
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ Kota	Kab. Grobogan	273 Laporan	14.340.590.000	APBD		273 Laporan	15.057.619.500

	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah		100%	1.163.048.000	APBD		100%	1.221.200.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Grobogan		1.163.048.000	APBD			1.221.200.400
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	Kab. Grobogan	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	157.500.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Grobogan	10 Dokumen	80.000.000	APBD		10 Dokumen	84.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Grobogan	49 Laporan	60.000.000	APBD		49 Laporan	63.000.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Grobogan	49 Laporan	150.000.000	APBD		49 Laporan	157.500.000
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Grobogan	12 Laporan	58.000.000	APBD		12 Laporan	60.900.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Grobogan	49 Dokumen	200.000.000	APBD		49 Dokumen	210.000.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Kab. Grobogan	49 Laporan	365.048.000,00	APBD		49 Laporan	383.300.400
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Kab. Grobogan	49 Laporan	100.000.000,00	APBD		49 Laporan	105.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		3%	7.620.000.000	APBD		3%	8.001.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kab. Grobogan		7.620.000.000	APBD			8.001.000.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Kab. Grobogan	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	210.000.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kab. Grobogan	3 Laporan	700.000.000	APBD		3 Laporan	735.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab. Grobogan	288 Unit	1.250.000.000	APBD		288 Unit	1.312.500.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah, subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Grobogan	304000 Laporan	3.500.000.000	APBD		304000 Laporan	3.675.000.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Kab. Grobogan	2 Laporan	150.000.000	APBD		2 Laporan	157.500.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	Kab. Grobogan	835000 Dokumen	225.000.000	APBD		835000 Dokumen	236.250.000

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Kab. Grobogan	17125 Layanan	285.000.000	APBD		17125 Layanan	299.250.000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kab. Grobogan	125000 Dokumen	150.000.000	APBD		125000 Dokumen	157.500.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kab. Grobogan	825000 Dokumen	300.000.000	APBD		825000 Dokumen	315.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kab. Grobogan	214 Dokumen	860.000.000	APBD		214 Dokumen	903.000.000


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya BPPKAD, dan juga jumlah dana yang diperlukan.

Adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati Grobogan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ANANG ARMUNANTO, S.Sos. M.Si
NIP. 19730102 199302 1 001